

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor publik memiliki tujuan yang berorientasi pada pencapaian kepuasan publik melalui pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Sektor ini bertanggungjawab kepada masyarakat (publik). Hal ini dikarenakan sumber pendanaannya berasal dari masyarakat antara lain pajak dan retribusi, oleh sebab itu sektor publik dalam hal ini pemerintah berusaha terus berbenah agar mampu menjadi *good government*, namun dalam pelaksanaannya di sektor pemerintah kadangkala terjadi tindak *fraud* yang dilakukan oleh personil maupun organisasi. Ragam *fraud* yang terjadi seperti yang tertera dalam *fraud tree* (ACFE, 2014). Merupakan bentuk *fraud* yang banyak terjadi diberbagai tingkatan sektor publik. Berikut disajikan jenis kasus *fraud* yang terjadi di pemerintah :

Tabel 1.1
Jenis *Fraud* di Pemerintah dan Administrasi Publik

Jenis Fraud	Jumlah Kasus	Persentase
Korupsi	50	35.5 %
Billing	33	23.4 %
Non-kas	27	19.1 %
Skimming	25	17.7 %
Expense Reimbursement	19	13.5 %
Payroll	18	12.8 %
Cek Tampering	15	10.6 %
Cash on Hand	12	8.5 %
Cash Larcery	10	7.1 %
Financial statement Fraud	9	6.4 %
Register Disbursement	4	2.8 %

Sumber : *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2012 Global Fraud Study* oleh the Association of Certified Fraud examiners (ACFE).

Berdasarkan Tabel 1.1 kasus *fraud* tampak makin beragam oleh karenanya diperlukan suatu solusi guna mencegah, mendeteksi dan investigasi *fraud*, dengan menggunakan alat

yakni akuntansi forensik . Ilmu akuntansi forensik ini sudah ada sejak kasus Al Capone terungkap pada 1931 silam oleh seorang akuntan forensik, Frank J. Wilson namun, organisasi profesinya baru terbentuk beberapa dekade belakangan. *Association of Certified Fraud Examiners* baru terbentuk pada 1988. Kampusnya, *American College of Forensic Examiners* juga baru berdiri pada 1992. Jadi peran akuntansi forensik sebenarnya sudah di praktikan di negara Amerika. Di Indonesia, akuntansi forensik sebenarnya juga telah dipraktekkan. Kasus pertama yang diselesaikan dengan menggunakan akuntansi forensik di Indonesia adalah kasus Bank Bali oleh *Pricewaterhouse Coopers* (PwC). Selain itu terdapat pula kasus sengketa antara PT Telkom dan PT Aria West International (AWI) pada tahun 2003 yang juga melibatkan penggunaan akuntansi forensik.

Akuntansi Forensik (FA). Ini adalah kombinasi dari Akuntansi, Auditing dan Keterampilan investigasi. Akuntan forensik terkait dengan mencegah, mendeteksi dan Investigasi fraud dalam pelaporan keuangan (Chakrabarti, 2014). Ketika sampai pada tindak investigasi ini maka akuntansi forensik akan menentukan apakah individu atau organisasi tersebut terlibat aktifitas keuangan yang illegal atau tidak. Berdasarkan definisi yang dibangun oleh *Association of Institute of Certified Public Accountant (AICPA'S)* Forensik dan komitee litigasi bahwa akuntansi forensik melibatkan keahlian khusus dibidang akuntansi, audit, keuangan, metode kuantitatif, hukum dan *research*. Hal ini juga melibatkan keterampilan kuantitatif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti keuangan, serta kemampuan untuk menginterpretasikan dan mengkomunikasikan temuan.

Di Indonesia banyak ragam kasus *fraud* terjadi dan belum terlihat adanya kecendrungan penurunan. Kasus *fraud* yang terjadipun tidak hanya terjadi di pusat namun juga di daerah. Masyarakat sangat mengharapkan peran BPK dalam mengungkap *fraud*, sehingga opini BPK dapat dijadikan dasar terhadap baik-buruknya jalannya pemerintah. BPK dalam menjalankan tugasnya menggunakan tiga jenis pemeriksaan yakni, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk

memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan selain dua jenis tersebut, termasuk disini adalah pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (*fraud*) atau korupsi, pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan nantinya akan muncul opini BPK yang terdiri atas wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat. Salah satu opini yang menjadi harapan daerah adalah Opini WTP. Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Menurut Tuannakotta (2007:286) ada ekspektasi gap antara kesenjangan kinerja auditor dan harapan pemakai laporan keuangan artinya ketika entitas mendapatkan opini WTP tetapi dikemudian hari ternyata terkuak praktek korupsi akibatnya ramai-ramai masyarakat mempertanyakan pemberian opini tersebut. Menurut BPK bahwa opini WTP tidak menjamin bahwa pada entitas yang bersangkutan tidak ada korupsi, karena pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi. BPK wajib mengungkapkan apabila menemukan ketidakpatuhan atau ketidakpatutan baik yang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penuturan Soepardi (2011), "Pemda yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tidak menjamin Pemda tersebut bebas korupsi". Akibat masih adanya Gap tersebut maka, kepercayaan masyarakat terhadap opini WTP menurun karena banyak indikasi kasus korupsi yang teridentifikasi justru setelah daerah tersebut mendapat opini WTP. Adanya opini WTP hanya menjadi tempat bagi lembaga pemerintah sebagai tameng untuk melakukan aksi fraud yang sulit di control oleh masyarakat.

Fenomena diatas apabila terus terjadi maka akan menyebabkan timbulnya kecendrungan sektor publik melakukan tindakan *fraud* atau lebih dikenal dengan istilah korupsi, yang ditengarai memiliki berbagai macam modus. Beberapa contoh modus *fraud* yang terjadi di daerah menurut Tuannakotta (2007, 34-35) : kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dana /anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggung jawabkan pengeluaran-pengeluaran tersebut dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif. Pengusaha mempengaruhi kepala daerah/pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dengan harga barang/jasa dinaikkan (*markup*) kemudian selisihnya dibagi-bagikan ataupun panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah kemerk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan *markup* harga atau kontrak. Berbagai modus operandi kecurangan/ korupsi untuk sektor publik ini dikenal dengan pohon kerugian keuangan Negara (*Real tree*), melihat banyaknya kasus yang terjadi disektor publik membuktikan saat ini dan dimasa yang akan datang makin diperlukan keahlian dibidang akuntansi forensik. Karena tindak *fraud* ini dapat diibaratkan sebuah gunung bola salju, tampak tenang namun didalamnya penuh gejolak yang harus segera di tangani karena makin lama maka akan semakin sulit jejaknya untuk melacaknya.

Banyaknya kasus *fraud* yang terjadi disektor publik juga terjadi di seluruh Negara yang ada didunia, sehingga banyak kajian yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga survey misalnya oleh *Corruption Perception Indeks* (CPI). Indonesia meraih skor CPI 34 point. Skor itu hanya naik dua digit dibanding 2013, yang hanya 32 point. Skor rata-rata CPI ASEAN adalah 39 poin, Asia pacific 43 point dan komunitas G20 adalah 54 poin. Dengan skor tersebut, Indonesia menempati posisi ke-107 sedunia (Jawapos, 2014). Definisi yang digunakan dalam survey ini adalah berdasarkan sumber dari *Economist Intelligent Unit* metode penilaiannya antara lain melihat apakah ada kebiasaan pembayaran suap untuk mendapatkan kontrak atau layanan

public, seberapa jauh. Sumber penilaiannya lainnya adalah Political and Economic Risk Consultancy dimana penilaiannya terkait dengan seberapa jauh korupsi terjadi di level pemerintahan. Penilaian buruk lainnya terdapat pada word justice project yang mengukur seberapa jauh penyalahgunaan wewenang lembaga public. Penilaian *Bertelsmann foundation transformation* yang mengukur efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Banyaknya kajian *fraud* dalam hal ini lebih cenderung dikategorikan dalam korupsi. Selanjutnya menyebabkan para peneliti melakukan penelitian mengenai upaya guna mencegah dan mendeteksi *fraud* menggunakan alat dalam hal ini yakni akuntansi forensik.

Penelitian mengenai akuntansi forensik ini telah banyak dilakukan. Salah satunya yakni penelitian yang dilakukan Okoye dan Gbegi (2013) bahwa penggunaan Akuntansi Forensik secara signifikan mengurangi terjadinya kasus *fraud* di sektor publik serta ada signifikansi perbedaan antara profesional forensik dan auditor eksternal tradisional oleh karena itu penggunaan akuntansi forensik dapat membantu lebih baik dalam mendeteksi dan mencegah kasus *fraud* dalam organisasi sektor publik. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Eiya *et al* (2013) hasilnya akuntansi forensik dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kejahatan keuangan di Nigeria. Penelitian Omar *et al* (2013) menunjukkan bahwa sebagian besar administrator pemerintah memahami peran akuntan forensik dan percaya bahwa keberadaan akuntansi forensik adalah strategi keuangan untuk mengekang dan menyelesaikan *fraud* keuangan dan kejahatan dalam perekonomian Malaysia. Penelitian oleh Islam, Rahnan dan Hosan (2011) mengungkapkan bahwa akuntansi forensik sebagai alat deteksi *fraud* memiliki relevansi dengan upaya untuk memerangi *fraud* dan korupsi di Bangladesh. Selanjutnya penelitian oleh Festus (2012) akuntansi forensik dapat digunakan sebagai penangkal kejahatan dan keuangan di Nigeria. Modugu dan Anyaduba (2013) Ada pengaruh yang signifikan antara *stakeholder* terhadap efektivitas akuntansi forensik dan *fraud control*, pelaporan keuangan dan kualitas pengendalian internal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan permasalahan adalah :

1. Apakah akuntansi forensik mampu mencegah *fraud* di pemerintah daerah ?
2. Apakah akuntansi forensik mampu mendeteksi *fraud* di pemerintah daerah ?
3. Apakah akuntansi forensik mampu menginvestigasi *fraud* di pemerintah daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan akuntansi forensik mencegah *fraud* di pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan akuntansi forensik mendeteksi *fraud* di pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan akuntansi forensik menginvestigasi *fraud* di pemerintah daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi kalangan akademisi penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran penting akuntansi forensik dalam tindak mencegah, mendeteksi dan investigasi terhadap terjadinya *fraud* di sektor publik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan bahan acuan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi kalangan regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana untuk menciptakan tenaga forensik pemma melalui pendidikan maupun pelatihan para aparat

pengawas ataupun aparat pengelola keuangan terkait, agar lebih memiliki bekal yang dapat menyelesaikan masalah *fraud* disektor publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab dan setiap babnya terbagi menjadi beberapa sub bab. Secara garis besar, pembahasan dari bab-bab tersebut terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II. TELAAH PUSAKA

Pada bagian ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu yang melandasi analisis dalam melakukan penelitian.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisi mengenai jenis penelitian dan gambaran populasi, tehnik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran serta tehnik dan analisis data, sehingga nantinya dapat dihasilkan suatu kesimpulan penelitian.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan ini berisi tentang analisis kuantitatif, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil pembahasan dari bab IV.

